

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK**  
**KOMISI BIDANG TEKHNIS**  
**KOMISI I PERADILAN UMUM**  
**SUB KOMISI IA (PERDATA)**

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema “***Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim***”.

**Memperhatikan** : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.  
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.  
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.  
4. Pengarahan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.

**Membaca** : Paparan yang disajikan :  
  
Oleh Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI. (Yang Mulia Bapak H. Suwardi, SH.,MH.)

**Mendengar** : 1. Tanggapan para peserta.  
2. Penjelasan dari Narasumber.

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pemantapan sistim kamar untuk mewujudkan kesatuan hukum dan meningkatkan profesionalisme Hakim, maka Mahkamah Agung telah

menyelenggarakan Rakernas di Manado pada tanggal 28 Oktober s/d 1 November 2012.

Dalam Rakernas tersebut telah dipaparkan beberapa materi antara lain materi bidang Perdata dengan judul : “PENGUNAAN LEMBAGA PUTUSAN SERTA MERTA (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang dipaparkan oleh Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI. (Yang Mulia Bapak H. Suwardi SH.MH.)

2. Bahwa setelah mendengar paparan dari Narasumber serta pendapat yang berkembang di dalam diskusi Kelompok Komisi I, maka perlu dirumuskan pokok-pokok pemikiran yang dapat dijadikan pedoman bagi para Hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

**Mengingat** : Pasal 180 ayat (1) HIR ; Pasal 191 ayat (1) RBg ; SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* ; SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil*.

### **M E N Y I M P U L K A N :**

1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan perlawanan atau banding.

## 2. Dasar Hukum

- Pasal 180 ayat (1) HIR .
- Pasal 191 ayat (1) RBg .
- SEMA No.13 Tahun 1964.
- SEMA No.5 Tahun 1969.
- SEMA No.3 Tahun 1971.
- SEMA No.6 Tahun 1975.
- SEMA No. 3 Tahun 1978.
- SEMA No.3 Tahun 2000.
- SEMA No. 4 Tahun 2004.

Dari beberapa SEMA tersebut yang masih berlaku dan harus dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta dan eksekusinya adalah SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001.

3. Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut. Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif , artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila didalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim “dapat” mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta.
4. Syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg :
  - Ada surat otentik atau tulisan tangan ( *handscrift* ) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
  - Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
  - Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*.
  - Sedangkan menurut SEMA No.3 Tahun 2000 persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta adalah sebagai berikut :
    - a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya , yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
    - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
    - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik.
    - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
    - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
    - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
5. Syarat utama menjatuhkan putusan serta merta harus didukung dengan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagai berikut :
- yang cukup sempurna ( *vollendig bewijskracht* ).
  - yang bernilai kekuatan mengikat ( *bindende bewijskracht* ).
  - yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan ( *beslissende bewijskracht* ).

Sesuai dengan SEMA Nomor. 4 Tahun 2001 jo SEMA Nomor. 3 Tahun 2000 apabila majelis hakim akan menjatuhkan putusan serta merta terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya. Hal tersebut tidak mengurangi asas kemandirian Hakim, oleh karena yang akan melaksanakan putusan serta merta adalah Ketua Pengadilan Negeri.

6. SEMA No.3 Tahun 2000 menentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Apabila penggugat mengajukan permohonan agar putusan serta merta dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan dilampiri pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, serta memperhatikan dampak sosialnya sebelum memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta.

Jika perkara sudah sampai ke tingkat kasasi sedangkan putusan serta merta belum dieksekusi, menurut SEMA terdahulu ditentukan pelaksanaan putusan serta merta harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung, tetapi sejak keluarnya SEMA No. 5 Tahun 1969 untuk memberikan persetujuan tersebut didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Sementara SEMA No. 3 Tahun 2000, tidak memerinci perkara sampai ditingkat mana, akan tetapi hanya mengatur untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dengan merujuk SEMA terdahulu maka sekalipun perkara sudah ditingkat kasasi yang berwenang memberikan persetujuan adalah Ketua Pengadilan Tinggi.

7. Jika permohonan eksekusi putusan serta merta disetujui oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka Ketua Pengadilan Negeri, membuat penetapan tentang pemberian jaminan. Dalam SEMA No.3 Tahun 2000 tidak dirinci pemberian jaminan tersebut dalam bentuk apa, akan tetapi jika mengacu pada SEMA No.6 Tahun 1975 ditentukan :
- Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau dalam kasasi.
  - Jangan menerima penjaminan orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.
  - Penentuan benda serta jumlahnya terserah Ketua Pengadilan Negeri.
  - Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Tentang pemberian jaminan tersebut, dipertegas lagi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, bahwa tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Sehingga dengan mengacu pada SEMA Nomor. 6 Tahun 1975, untuk mempermudah pelaksanaan putusan apabila putusan Pengadilan Negeri nanti dibatalkan dalam Tingkat Banding atau Tingkat Kasasi maka sebaiknya jaminan tersebut dalam bentuk uang atau barang (misalnya berupa emas) yang nilainya sama atau setara dengan obyek eksekusi.

8. Apabila putusan serta merta telah di eksekusi dan objek eksekusi telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi, kemudian putusan Pengadilan Negeri ditingkat banding dan kasasi dibatalkan, serta gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka harus dilakukan pemulihan dalam keadaan semula. Jika objek eksekusi masih utuh, harus diserahkan kembali pada Termohon eksekusi secara langsung. Tetapi jika objek eksekusi telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga misalnya dijual atau dihibahkan,

maka pemulihan dalam keadaan semula dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam pemulihan eksekusi barang yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka apabila pihak ketiga tersebut memperolehnya atau membelinya dengan itikat baik misalnya melalui lelang eksekusi, maka pihak ketiga tersebut harus dilindungi dan pihak tergugat atau termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi kepada pihak Penggugat (Pemohon eksekusi putusan serta merta).

9. Bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama sedang Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang menjatuhkan putusan serta merta (Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg.
10. Berdasarkan SEMA Nomor. 3 Tahun 2000, apabila Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan serta merta tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau terjadi penyimpangan maka Mahkamah Agung akan mengambil tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.

Manado, 31 Oktober 2012

**Team Perumus :**

**Ketua,**



**HJ. MAULIDA, SH.MH.**  
(KPT TANJUNG KARANG)

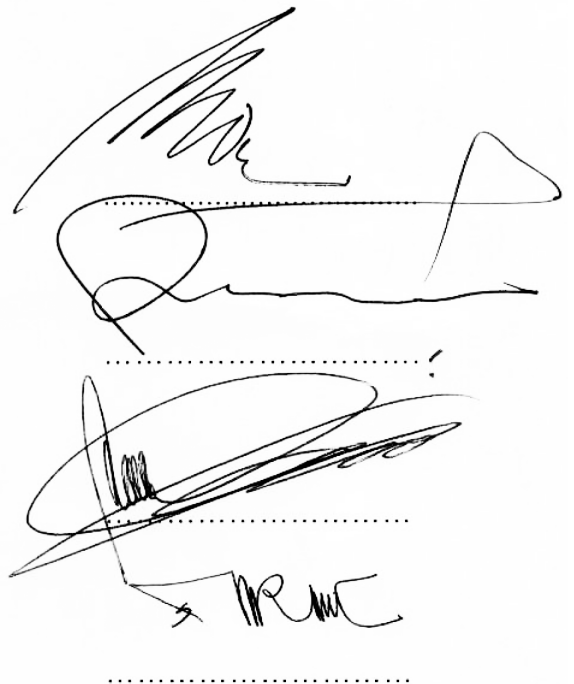
**Sekretaris,**



**NELIDA, SH.**  
(PANSEK PT TANJUNG KARANG)

**Anggota :**

1. MOERINO, SH.  
(KPT. BANGKA BELITUNG)
2. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.,M.HUM.  
( KPT BANTEN )
3. MD. PASARIBU, SH.,M.HUM.  
( WKPT MEDAN )
4. Dr.HJ. SRI SUTATIEK, SH.,M.HUM.  
( WKPT PALU )





**ANGGOTA KOMISI I A (PERDATA)**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>J A B A T A N</b>
1.	H. Abdul Kadir Mappong, S.H.	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial
2.	H. Suwardi, S.H., M.H.	Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI
3.	Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.	Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung
4.	I Made Tara, S.H.	Hakim Agung
5.	H. Muhammad Taufik, S.H., M.H	
6.	Prof. Rehngena Purba, S.H., MS.	
7.	Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhof, S.H., M.H.	
8.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	
9.	Samsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	
10.	H. Djafni Djamal, S.H., M.H.	
11.	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	
12.	Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.	
13.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.	
14.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	
15.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	

HAKIM AD HOC PHI

1.	Jono Sihono, S.H.	Hakim Ad Hoc PHI
2.	Bernard, S.H., M.H.	
3.	Arief Soedjito, S.H	
4.	Arsyad, S.H., M.H.	
5.	Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.	
6.	Fauzan, S.H., M.H.	
7.	Horadin Saragih, S.H., M.H.	
8.	H. Buyung Marizal, S.H.	

ESELON I DAN II

1.	Soeroso Ono, S.H., M.H.	Panitera Mahkamah Agung
2.	Dr. H. Cicut Sutiarto, S.H., M.Hum	Dirjen Badan Peradilan Umum
3.	Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata
4.	Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Khusus
5.	Mugyana Sukandar, S.H., M.H.	Sekretaris Dirjen Badilum
6.	Ali Murad Harahap, S.H., M.H	Sekretaris Panitera
7.	H.RM. Anton Sujatno, S.H., M.H.	Direktur Binaan Badilum
8.	Drs. Mahyudin, M.Si.	Direktur Pembinaan Administrasi Badilum
9.	Sudaryo, S.H.	Direktur Pratalak Perdata Badilum

KETUA PENGADILAN TINGGI

1.	Ansjahrul, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
2.	Dr. Sareh Wijono, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
3.	A.TH. Pudjiwahono, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi
4.	H. Suwardi, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
5.	Henricus Soejatmo, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi

6.	Soemarno, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi
7.	H.M. Mas'ud Halim, S.H., M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi
8.	Dr. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Tinggi
9.	Sabirin Janah, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
10.	Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
11.	I Ketut Gede, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
12.	Sugeng Achmad Yudhi, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
13.	Moerino, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
14.	Ny. Hj. Partinia Alamsjah, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
15.	Ny. Maulida, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
16.	I Made Ariwangsa, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
17.	Yohanes Ether Binti, S.H., M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi
18.	Dr. Muh Daming Sunusi, S.H., M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi
19.	Suryadarma Belo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
20.	Muhammad Ramli, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
21.	Gimin Aris Wardojo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
22.	H.M. Fachrur Rozie, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
23.	Dam Dam Bachtiar, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
24.	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi
25.	Anasroel Haroen, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
26.	Mabruq Nur, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi
27.	I Nengah Suriada, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi
28.	Andarias Kadang Paruasan, S.H.	Ketua Pengadilan Tinggi

## WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI

1.	I Gede Sumitra, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
2.	H. Sjam Amansjah, S.H., M.H.	
3.	Tewer Nussa Steven, S.H., M.H., S.H.	
4.	Achmad Iswandi, S.H.	
5.	Dr. Soedarmadji, S.H., M.Hum.	
6.	H. Sumantri, S.H., M.H.	
7.	Abdul Kadir, S.H., M.H.	
8.	Adam Hidayat Abu Atiek, S.H., M.H.	
9.	Husni Rizal, S.H.	
10.	H. Haryanto, S.H., M.H.	
11.	Dr. Ny. Andriani Nurdin, S.H., M.H.	
12.	Hj. Salma Ali, S.H., M.H.	
13.	Hesmu Purwanto, S.H., M.H.	
14.	Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum.	
15.	Yunus Dandel, S.H.	
16.	Zahrul Rabain, S.H., M.H.	
17.	Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.	
18.	Robinson Tarigan, S.H., M.H.	
19.	Zaid Umar Bob Said, S.H.	
20.	Arwan Byrin, S.H., M.H.	
21.	Nasaruddin Tappo, S.H.	
22.	Makkasau, S.H., M.H.	

ASISTEN KOORDINATOR

1.	Ninin Murnindrati, S.H.	Asisten Koordinator
2.	Enny Indriyastuti, S.H., M.H.	Asisten Koordinator
3.	Budi Hapsari, S.H.	Asisten Koordinator

PANSEK TINGKAT BANDING

1.	Joko Sabar Simatupang, SH	Pansek PT.
2.	Nelida, S.H.	
3.	Sahabuddin Samad, S.H.	
4.	I Ketut Sumarta, S.H.	
5.	Waluyo Sutjipto, S.H., M.H.	
6.	Drs. Lasmen Sinurat, S.H.	
7.	I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.H.	
8.	Lilies Djuaningsih, S.H., M.H.	
9.	Tjatur Wahjoe Boewana Soegito Poetro, S.H., M.Hum.	
10.	Wuryanto, S.H.	
11.	Pujiono Akhmadi, S.H., M.H.	
12.	Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum.	
13.	Muljono, S.H.	
14.	Sintje Tinike Sampelan, S.H.	
15.	Mujizat, S.H., M.H.	
16.	Meri Ulfa, S.H., M.H.	
17.	Soehardi, S.H.	
18.	Arman, S.H.	
19.	Chairul Sutrisno, S.H., CN., M.M.	
20.	M. Basir, S.H.	

21.	Joni Effendi, S.H., M.H.	
22.	Saudin Napitupulu, S.H.	
23.	Syamsul Alam, S.H.	
24.	H. Ardani, S.H.	
25.	Bakri Ali, S.H.	
26.	Ruslan, S.H., M.H.	
27.	H. Said Salem, S.H., M.H.	
28.	Yohanes A. Sandy, S.H.	
29.	Dominikus Mamoh, S.H.	